

Jokowi Mengakui Adanya Pelanggaran HAM Berat



Presiden Joko Widodo memberikan keterangan tentang pelanggaran HAM berat di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Januari 2023.

PRESIDEN Joko Widodo mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lampau. Ia mengatakan pemerintah berupaya agar pelanggaran HAM berat tak terjadi lagi pada masa mendatang. "Saya mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi di berbagai peristiwa," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu, 11 Januari lalu.

Presiden menyebutkan ada 12 kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Di antaranya peristiwa 1965, kerusuhan Mei 1998, dan kasus Jambo Keupok di Aceh pada 2003. Jokowi menyebutkan pemerintah berusaha memulihkan hak korban dan tak mengabaikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui jalur yudisial.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan ada kasus yang tak bisa diproses secara hukum. Sebab, pemerintah ingin memprioritaskan

penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat jalur non-yudisial. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Maneger Nasution menyebutkan pengakuan pemerintah adalah langkah awal untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan mekanisme yudisial masih harus ditempuh. Ketua Komnas HAM AtNIke Nova SigiRo meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. memfasilitasi koordinasi lembaganya dengan Kejaksaan Agung. Tujuannya, mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Fatia Maulidiyanti mengatakan pengakuan pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM berat tak berarti jika tak ada kebijakan yang konkret. "Model penyelesaian yang dibuat pemerintah sering tak berpihak kepada korban," ujar Fatia. ①

PILIH-PILIH KASUS

PRESIDEN Joko Widodo mengakui adanya 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Mengesampingkan peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinannya.

Kasus yang Diakui Jokowi:

- ▼ Peristiwa 1965
- ▼ Penembakan misterius (1982-1985)
- ▼ Talangsari, Lampung (1989)
- ▼ Rumoh Geudong dan pos militer di Aceh (1989-1998)
- ▼ Penghilangan orang secara paksa (1997-1998)
- ▼ Kerusuhan Mei 1998
- ▼ Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (1998-1999)
- ▼ Pembunuhan dukun santet (1999)
- ▼ Wasior (2001-2002)
- ▼ Wamena (2003)
- ▼ Jambo Keupok (2003)

Kasus yang Tak Diakui Jokowi:

▼ **Panai (2014)**
Majelis hakim memvonis bebas terdakwa kasus Panai, Isak Sattu, dan menyatakan pelanggaran HAM di Panai tak terpenuhi.

▼ Abepura (2000)

Pengadilan membebaskan Brigadir Jenderal Johnny Wainal Usman karena tak terbukti melanggar HAM. Polisi menangkap 99 warga sipil, 2 di antaranya tewas disiksa.

▼ Timor Timur (1999)

Pelanggaran HAM terjadi ketika militer menguasai Timor Timur. Salah satunya penembakan di taman permakaman Santa Cruz, Dili.

▼ Tanjung Priok (1984)

Sejumlah petugas divonis bersalah. Namun pengadilan membebaskan sejumlah perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari tuntutan.